

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Audah, Abdul Qadir. 2001. "*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Media Pratama.
- Bintarto, R. 2010, "*Desa Kota*", Bandung: Alumni
- Daljoeni, N. 2011, "*Interaksi Desa-Kota*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Evi, Hartanti. 2005. "*Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghofur, Abdul dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total Media.
- Handoko, Rico. 2011, "*Analisa Hukum Korupsi Dalam Islam*", Jakarta: Pustaka Buku.
- Hatta, Muhammad, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Sulawesi: Unimal Press.
- Irfan, Muhammad Nurul, 2003, "*Fiqh Jinayah*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, Muhammad Nurul, 2009, "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Kartono, Kartini. 2003, "*Patologi Sosial*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, L, 2003, "*Menyingkap Korupsi di daerah*", Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Minarno, Nur Basuki, 2009, "*Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*", Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Moeljatno, 2015, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammadiyah & Nahdatul ulama, 2010, *Koruptor itu kafir*, Jakarta: Mizan.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, 2014, "*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*", Malang: Setara Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001, "*Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*", Bandung: Mandar Maju.
- Rafi', Abdur dan Fida', Abu. 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Jakarta: Republika.
- Renggong, Ruslan, 2016, "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*", Jakarta: Prenadamedia.
- Rewansyah, Asnawi, 2011, "*Akutansi Desa Teori dan Praktek*", Malang: SC IRDH.
- Sabiq, Sayyid. 2013, "*Fiqh Sunnah Edisi Terbaru Jilid II*", Bandung: Beirut Publishing.
- Utomo, Setiawan Budi, 2003, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Press Insani.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardiono, Kelik & Rochman, Saepul. 2019, *Dialektika Wacana Modernis*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

## **Jurnal**

- Atmasasmita, Romli. *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3, No. 1, 2016. Hal. 15.
- Ifrani. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl. Vol. IX, No. 3, Desember 2017. Hal. 319-320
- Ifrani. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al' Adl. Vol. IX, No. 3, 2017. Hal. 323.
- Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal IUS, Vol. VI, No. 3, Desember 2018. Hal. 431

Taufikqurrahman, M. *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122

Winarni, Endah Dwi. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*. Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1, No. 1, Maret 2018. Hal. 278-279

Zakariya, R. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. Jurnal Antikorupsi. Vol. 6, No. 2, Hal. 264

### **Peraturan Perundagn-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 28 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Internet**

Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> Diakses pada 9 september 2021.

Fatwa MUI: Korupsi Haram. <http://www.viva.co.id/arsip/25082-fatwa-mui-korupsi-haram> Diakses pada 4 november 2021.

Ihsanuddin, "ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp. 40,6 Miliar", Artikel : <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/05/19000481/icw-ada-181->

[kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all](https://id.wikipedia.org/wiki/kasus_korupsi_dana_desa_rugikan_negara_rp_406_miliar?page=all)

Diakses pada 5 oktober 2021.

Pemerintah Desa. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah\\_Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa) Diakses pada 11 september 2021.